

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam UUD 1945 mengamanatkan bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, negara menjamin setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan dan terselenggaranya sistem Pendidikan Nasional atau sisdiknas yang diatur dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 dalam Pasal 5 Ayat 2 dan 4 menyatakan bahwa “setiap warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Berkaitan dengan hal tersebut maka setiap anak berkebutuhan khusus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas”.<sup>1</sup>

Seiring dengan desentralisasi pendidikan, maka bergulirlah konsep Manajemen Berbasis Sekolah, yang intinya adalah sekolah mampu mandiri, merencanakan sekaligus melaksanakan pendidikan secara otonomi dengan mengutamakan masyarakat lingkungan sekitar terutama komite sekolah sebagai pendukung pendidikan.

Upaya peningkatan mutu di sekolah sampai saat ini cenderung belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Beberapa masalah yang membuat peningkatan mutu sekolah tidak berjalan, antara lain sarana dan prasarana sekolah untuk memberikan layanan yang maksimal masih sangat kurang, sumber daya manusia yang masih kurang terutama pemahaman dalam hal pendidikan inklusif,

---

<sup>1</sup> <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/7308/UU0202003.htm> diunduh tanggal 3 juli 2020

peran serta masyarakat sekitar yang masih kurang peduli dengan pendidikan inklusif.

Menurut permendiknas nomor 70 tahun 2009, pendidikan inklusif adalah “sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”.<sup>2</sup>

Pendidikan inklusif bertujuan antara lain (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.<sup>3</sup>

Pendidikan inklusif dilaksanakan di sekolah reguler mulai tingkat TK, SD, SMP, dan SMK SMA sejak tahun 2014, sehingga semua jenjang pendidikan dapat menerima siswa dengan berkebutuhan khusus atau di sebut dengan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK), diharapkan dengan masuknya anak berkebutuhan khusus ke sekolah reguler dapat meningkatkan kemampuan dalam bersosialisasi dengan anak-anak reguler, dan memberikan pengalamannya dalam mengikuti aktivitas di sekolah reguler, dan mereka merasa tidak dibeda-bedakan dengan siswa lainnya. PDBK yang diterima disekolah reguler dalam kategori keterbatasan yang dapat diberikan pengajaran atau sekolah penyelenggara

---

<sup>2</sup> [www.kemdikbud> main>blog.2019/07](http://www.kemdikbud>main>blog.2019/07) diunduh tanggal 3 Juli 2020

<sup>3</sup> Dedy Kustawan, *Pendidikan Inklusif dan Upaya Implementasinya*, (Jakarta: Luxima Metro Media, 2013), h.9

pendidikan inklusif bertujuan melatih kemandirian peserta didik berkebutuhan khusus yang mampu didik<sup>4</sup>

Dalam meningkatkan Program Sekolah Inklusif tentunya tidak terlepas dari Manajemen Pendidikan Inklusif yang dikelola oleh kepala sekolah, semua komponen Pendidikan seperti kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana dan hubungan masyarakat menjadi perhatian kepala sekolah. Secara khusus di dalam Pendidikan inklusif tentu ada peserta didik berkebutuhan khusus yang mendapatkan pendidikan setara dengan peserta didik reguler. Sayangnya program inklusi di Indonesia saat ini masih berjalan kurang maksimal dikarenakan manajemen atau pengelolaan yang tidak terkoordinasi, di dalam perjalanan perkembangan pendidikan inklusif saat ini masih terdapat sekolah-sekolah yang menjalankan program pendidikan inklusif dengan pengelolaan yang tidak jelas dari sistem assesmen, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan program ini di beberapa sekolah inklusif.

Permasalahan pendidikan inklusif tentunya tidak hanya menjadi tugas dari orang yang berkecimpung dalam Pendidikan Luar Biasa atau praktisi inklusif saja namun manajemen pendidikan inklusif memiliki peranserta sebagai penghasil sumber daya manusia (SDM) yang handal dan profesional yang membangun dan mengembangkan lembaga Pendidikan. Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan manajemen pendidikan inklusif sangat dibutuhkan eksistensi manajemen pendidikan sehingga dengan manajemen yang tertata dengan baik meliputi pengelolaan kurikulum, pengelolaan peserta didik, pengelolaan tenaga

---

<sup>4</sup> Afin Murtie, Ensiklopedi Anak berkebutuhan Khusus (Jogyakarta: Maxima, 2014) h.225.

pendidik kependidikan, pengelolaan sarana, pengelolaan pembiayaan dan pengelolaan hubungan masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif diperlukan manajemen pendidikan seperti halnya manajemen pendidikan secara umum, manajemen pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, efisien mandiri dan akuntabel disekolah-sekolah.<sup>5</sup> Berdasarkan pengertian itu penyelenggaraan pendidikan inklusif memerlukan manajemen secara spesifik yaitu manajemen pendidikan inklusif yang meliputi antara lain proses perencanaan, pengorganisasi, pengarahan dan pengendalian pada komponen kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik dan sarana prasarana pendidikan inklusif dan hubungan sekolah dengan masyarakat.

Manajemen pendidikan inklusif disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pendidikan bagi anak yang memerlukan layanan khusus atau peserta didik berkebutuhan khusus. Agar pengembangan pendidikan terpadu dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dan tetap mengutamakan peningkatan mutu pendidikan, maka diperlukan suatu manajemen sekolah terpadu (inklusif) yang baik. Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu didukung kemampuan manajerial Kepala Sekolah. Kepala Sekolah hendaknya berupaya untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal dengan berorientasi pada karakteristik pendidikan inklusif.

---

<sup>5</sup> Abdul Rahmat, *Manajemen Pendidikan Nonformal*, (Ponorogo: Wade, 2017) h. 41.

Fenomena yang terjadi di lapangan khususnya pada pendidikan menengah/kejuruan SMA/SMK di kabupaten Banjar menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah SMA Negeri 1 Martapura, SMA Negeri 2 Martapura, SMA Negeri 1 Mataraman, SMA Negeri 1 Aluh-Aluh, SMK N 1 Martapura, SMK PGRI Martapura, dan SMK Negeri Simpang Empat dan SMK N Sungai Tabuk.<sup>6</sup> Menurut hasil wawancara dengan ketua Forum Komunikasi Pendidikan Inklusif (FKPI) Sekolah-sekolah ini menyatakan dirinya sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, namun sebagian dari sekolah-sekolah tersebut belum diketahui dengan jelas bagaimana manajemen pendidikan inklusif yang telah dilaksanakan karena sekolah-sekolah tersebut belum memberikan laporan kepada FKPI tentang keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus.<sup>7</sup>

Berdasarkan studi pendahuluan ditemukan 3 sekolah yang telah melaksanakan pendidikan inklusif dibuktikan dengan ketiga sekolah tersebut memiliki peserta didik berkebutuhan khusus, sekolah-sekolah tersebut adalah SMA Negeri 1 Martapura memiliki 4 orang PDBK (tunadaksa ringan 2 orang, *cerebral palsy* 1 orang, lamban belajar 1 orang, SMA N 2 Martapura memiliki 9 orang PDBK (lamban belajar 7 orang, tunadaksa 1 orang, tuna wicara 1 orang) dan SMK Negeri 1 Martapura memiliki 18 orang PDBK yang tergolong memiliki kelainan fisik, emosional, sosial dan mental (tuna grahita ringan 2 orang, tuna daksa 3 orang, *slow learner* 5 orang, *cerebral palsy* 1 orang, tuna rungu 1 orang, *hemotohidrosis* 1 orang, *hidrosepalsy* 1 orang, *aspanger sindrom* 1 orang, *autis* 1 orang, tuna grahita 1 orang, dan tuna wicara 1 orang). PDBK yang mendapatkan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Isnu Wahyono, ketua MKKS, Tanggal 16 Desember 2018

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak Isnu Wahyono, ketua MKKS, Tanggal 16 Desember 2018

layanan khusus sebanyak 28 orang, mereka adalah peserta didik dari Sabah Malaysia dalam kategori peserta didik terasing, dan kurang mampu.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai sebuah pendidikan yang berkualitas tentunya diperlukan manajemen yang mampu memobilisasi sumber daya pendidikan dengan maksimal oleh karena itu sangat penting bagi sekolah melakukan penataan manajemen menurut substansi manajemen pendidikan, serta perlunya memahami apa arti dari manajemen pendidikan itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana manajemen pendidikan inklusif di tiga buah sekolah di kota Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah Manajemen pendidikan inklusif pada SMA/SMK Negeri di Kabupaten Banjar (Studi Multi Situs SMA Negeri 1 Martapura, SMA Negeri 2 Martapura, SMK Negeri 1 Martapura). Dengan subfokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manajemen kurikulum di sekolah penyelenggara pendidikan inkulsif SMA Negeri 1 Martapura, SMA Negeri 2 Martapura, SMK Negeri 1 Martapura
2. Manajemen peserta didik di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif SMA Negeri 1 Martapura, SMA Negeri 2 Martapura, SMK Negeri 1 Martapura

3. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif SMA Negeri 1 Martapura, SMA Negeri 2 Martapura, SMK Negeri 1 Martapura
4. Manajemen sarana dan prasarana di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif SMA Negeri 1 Martapura, SMA Negeri 2 Martapura, SMK Negeri 1 Martapura
5. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat SMA Negeri 1 Martapura, SMA Negeri 2 Martapura, SMK Negeri 1 Martapura

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fokus masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan manajemen pendidikan inklusif di tiga sekolah SMA/SMK Negeri di kabupaten Banjar. Dengan sub tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan manajemen kurikulum di sekolah penyelenggara pendidikan inkulsif SMA Negeri 1 Martapura, SMA Negeri 2 Martapura, SMK Negeri 1 Martapura
2. Menganalisis dan mendeskripsikan manajemen peserta didik di sekolah penyelenggara pendidikan inkulsif SMA Negeri 1 Martapura, SMA Negeri 2 Martapura dan SMK Negeri 1 Martapura
3. Menganalisis dan mendeskripsikan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah penyelenggara pendidikan inkulsif SMA Negeri 1 Martapura, SMA Negeri 2 Martapura, dan SMK Negeri 1 Martapura

4. Menganalisis dan mendeskripsikan manajemen sarana prasarana di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif SMA Negeri 1 Martapura, SMA Negeri 2 Martapura, dan SMK Negeri 1 Martapura.
5. Menganalisis dan mendeskripsikan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif SMA Negeri 1 Martapura, SMA Negeri 2 Martapura, dan SMK Negeri 1 Martapura.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara Teoritis
  - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan manajemen pendidikan inklusif pada SMA SMK Kabupaten Banjar yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.
  - b. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, terkait dengan aspek-aspek manajemen pendidikan inklusif .
2. Kegunaan secara Praktis
  - a. Kegunaan bagi peneliti :

Sebagai suatu ilmu manajemen yang harus dikuasai dalam menempuh pendidikan pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam.
  - b. Kegunaan bagi kepala sekolah penyelenggara pendidikan inklusif memberikan pengetahuan dan pemikiran baru bagi kepala sekolah tentang manajemen pendidikan inklusif, dan memotivasi guru memberikan pelayanan yang baik terhadap semua peserta didik sesuai dengan karakteristik, kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya.

## E. Definisi Istilah

Agar memberi pemahaman yang tepat serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul ini maka peneliti perlu mengemukakan arti atau pengertian baik masing-masing kata atau istilah agar mudah dipahami. Manajemen menurut George R. Terry adalah proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengendalian (Evaluating) atau biasa disebut POAC. Sedangkan manajemen Pendidikan adalah

sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Manajemen pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, efisien mandiri dan akuntabel.<sup>8</sup>

Secara sederhana manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam melaksanakan tugas pendidikan dengan menggunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Dengan mengadaptasi pengertian manajemen dari para ahli dapat dikemukakan manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan usaha

---

<sup>8</sup>Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Umi Aksara, 2010), h. 12.

pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

Pendidikan inklusif atau “inclusive” yang berarti mengajak masuk atau mengikutsertakan<sup>10</sup>. Mengajak masuk atau mengikutsertakan menurut UNESCO (2001, 17) berarti menghargai dan merangkul setiap individu dengan perbedaan latar belakang, jenis kelamin, etnik, usia, agama, bahasa, budaya, karakteristik. Status, cara/pola hidup, kondisi fisik, kemampuan, kelebihan dan kekurangan yang berbeda,<sup>11</sup> di Indonesia pendidikan inklusif secara resmi didefinisikan sebagai

Pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik<sup>12</sup>

Jadi pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang terbuka bagi semua individu dimana peserta didik berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama dengan peserta didik reguler mengakomodasi semua kebutuhan mereka sesuai dengan kondisi masing-masing individu.

Komponen-komponen manajemen pendidikan inklusif yang dikaji dalam penelitian ini adalah kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan,

---

<sup>9</sup> Tim Dosen UPI, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung,:Alfabeta, 2009), h.88.

<sup>10</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Dirjen Dikdas, Dirjen PKLK *POS dan Modul Pendidikan Inklusif Berbasis Sekolah*. (Jakarta, 2013 ), h. 22.

<sup>11</sup> \_\_\_\_\_ . h. 29.

<sup>12</sup>Sunardi dan Sunaryo, *Manajemen Pendidikan Inklusif, (Konsep, Kebijakan dan Implementasinya)*, (Jafn Anakku, Vol. 10, Nomor 2 Tahun 2011).

sarana prasarana dan hubungan masyarakat. Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, teknik penilaian serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kurikulum pendidikan inklusif merupakan kurikulum yang bersifat inklusif yakni “mengakomodasi peserta didik dengan berbagai latar belakang dan kemampuan”.<sup>13</sup>

Komponen peserta didik merupakan subyek sekaligus obyek dalam proses transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, peserta didik pada pendidikan inklusif terdiri dari peserta didik disabilitas dan abilitas, peserta didik disabilitas disebut sebagai peserta didik berkebutuhan khusus baik disebabkan oleh faktor internal seperti memiliki keterbatasan dan keunggulan (*gipted* dan *talented*) dan faktor eksternal, seperti anak terlantar, faqir miskin, minoritas dan lain-lain. Komponen pendidik dan tenaga kependidikan menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 5 dan 6 tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi salah satunya sebagai guru. Di dalam manajemen pendidikan inklusif guru pembimbing khusus juga merupakan bagian dari pendidik atau guru mata pelajaran.

Komponen sarana dan prasarana diatur dalam permendiknas no 24 tahun 2007 tentang sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dan sarana

---

<sup>13</sup> Dedy kustawan, Manajemen Pendidikan inklusif, Bandung (Luxima, 2013) h. 95

prasarana yang berorientasi pada pendidikan inklusif tercantum dalam permendiknas nomor 33 tahun 2008. Dan komponen hubungan masyarakat dimaksudkan disini adalah wadah-wadah di dalam masyarakat yang membantu penyelenggaraan pendidikan inklusif, seperti komite sekolah, orangtua peserta didik dan fórum-forum pemerhati pendidikan inklusif. Hal ini sesuai dengan bunti Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat (6) bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Ada tiga buah penelitian yang dapat mendukung penelitian ini yaitu:

Pertama, penelitian dari Ika Leli Erawati yang berjudul “Pendidikan Karakter Bangsa pada Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusif “Hasil penelitian ini meliputi 1) sekolah telah siap untuk memberikan layanan pendidikan bagi ABK meliputi kesiapan guru, kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan khusus anak dan fasilitas penunjang lainnya, 2) Pendidikan karakter bangsa ini dilakukan dengan cara mendampingi siswa ABK dengan siswa normal, serta melakukan pendekatan dengan kasih sayang, motivasi, memberi perhatian lebih tanpa membuat cemburu siswa regular lainnya, 3) Urgensi pendidikan karakter bangsa pada ABK di SD Negeri 2 Metro Selatan berupa interaksi siswa ABK sudah berjalan dengan baik meskipun masih ditemukan siswa ABK yang belum dapat berinteraksi dengan lingkungannya, 4) Kendala dan

hambatan dalam menangani siswa ABK yakni masih terdapat orang tua yang belum mendukung program inklusif dan belum terdapat assesmen khusus untuk siswa ABK<sup>14</sup>.

Kedua, penelitian oleh Wardatul Jannah yang berjudul *Manajemen Sarana dan Prasarana Pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kota Banjarmasin*. Penelitian ini difokuskan pada manajemen sarana dan prasarana di Sekolah Dasar Negeri (SDN) penyelenggara pendidikan inklusif di kota Banjarmasin yang berfokus pada penerapan fungsi-fungsi manajemen, yaitu: perencanaan sarana dan prasarana, pengadaan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana, inventarisasi sarana dan prasarana, dan penghapusan sarana dan prasarana.

Hasil penelitian ini adalah manajemen sarana dan prasarana pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) penyelenggara pendidikan inklusif di kota Banjarmasin sudah dilaksanakan sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen sarana dan prasarana sebagai berikut: (1) Perencanaan sarana dan prasarana dilakukan pada awal tahun ajaran melalui rapat sekolah dengan merumuskan tujuan perencanaan dan prosedur perencanaan; (2) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan dengan pembelian dan bantuan (hibah); (3) Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara terus menerus dan berkala diawasi koordinator sarana dan prasarana; (4) Inventarisasi yang dilakukan oleh koordinator sarana dan prasarana meliputi pencatatan dalam buku induk dan pembuatan kode khusus terhadap sarana

---

<sup>14</sup> Ika Leli Irawati, (tesis) *Pendidikan Karakter Bangsa pada Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusif di SDN 2 Metro Selatan*, diunduh tanggal 16 Nopember 2020

dan prasarana; dan (5) Penghapusan sarana dan prasarana.<sup>15</sup>

Ketiga, penelitian oleh Dyah Witasoka berjudul *Manajemen pendidikan inklusif SMA Muhammadiyah di Kota Yogyakarta*. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama. Pertama, SMA Inklusif tidak memiliki perencanaan khusus dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kedua, SMA Inklusif berusaha melaksanakan kegiatan manajemen sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa difabel. Ketiga, Kepala sekolah memiliki keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolahnya. Oleh karena itu, kepala sekolah melakukan komunikasi dan interaksi langsung dengan tenaga pendidik, tenaga GPK, bahkan siswa difabel agar dapat memantau pelayanan inklusif yang diberikan<sup>16</sup>.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **1. BAB I: Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian dan subfokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar belakang penelitian memuat konsep-konsep umum

---

<sup>15</sup> Wardatul Jannah (tesis) *Manajemen Sarana dan Prasarana Pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kota Banjarmasin* diunduh 20 Nopember 2018

<sup>16</sup> Dyah Witasoka (tesis) *Manajemen pendidikan inklusif SMA Muhammadiyah di Kota Yogyakarta*. Diunduh tanggal 16 Nopember 2018

manajemen pendidikan inklusif dan fenomena-fenomena pendidikan inklusif di SMA kabupaten Banjar, fokus penelitian tentang manajemen pendidikan inklusif pada SMA kabupaten Banjar dengan subfokus penelitian terkait dengan ruang lingkup manajemen pendidikan yaitu kurikulum pendidikan inklusif, peserta didik berkebutuhan khusus, tenaga pendidik pada sekolah inklusif dan sarana prasarana pendidikan inklusif.

## 2. BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang dapat digunakan atau relevan sebagai landasan atas kerangka berpikir untuk menyelesaikan masalah. Adapun teori-teori tersebut yaitu manajemen pendidikan inklusif, kebijakan pendidikan inklusif, ruang lingkup manajemen pendidikan inklusif, pengelolaan kurikulum pendidikan inklusif, pengelolaan peserta didik di sekolah inklusif, karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, tenaga pendidik pendidikan inklusif, sarana prasarana pendidikan inklusif dan pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat.

## 3. BAB III: Deskripsi Data Penelitian

Data kualitatif dikumpulkan seiring dengan waktu dalam bentuk catatan lapangan sistematis, catatan wawancara, dan transkrip, jurnal dan pemikiran peneliti dan catatan arsip. Data ini lalu diorganisir secara konseptual, dimulai dengan pengidentifikasian pola awal sementara sebelum dilapangan dan selama proses di lapangan kemudian dilakukan pendeskripsian secara detail pada setiap subfokus masalah sesuai dengan

hasil pengumpulan data melalui alat pengumpul data yaitu wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisis penelitian kualitatif yang digunakan adalah (1) analisis sebelum dilapangan dan analisis selama di lapangan, analisis selama di lapangan menggunakan *model Mile and Huberman*.

#### 4. Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab ini diuraikan hasil analisis data yang sudah melalui tahap-tahap analisis data menurut Spradley kemudian dihubungkan dengan teori yang ada dan implementasi yang ada di lapangan, hasilnya akan diketahui profil pengelolaan kurikulum di sekolah penyelenggara pendidikan inkulsif SMA Negeri 1 Martapura, SMA Negeri 2 Martapura, SMK Negeri 1 Martapura, profil pengelolaan peserta didik di sekolah penyelenggara pendidikan inkulsif SMA Negeri 1 Martapura, SMA Negeri 2 Martapura dan SMK Negeri 1 Martapura, profil pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah penyelenggara pendidikan inkulsif SMA Negeri 1 Martapura, SMA Negeri 2 Martapura, dan SMK Negeri 1 Martapura, profil pengelolaan sarana prasarana di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif SMA Negeri 1 Martapura, SMA Negeri 2 Martapura, dan SMK Negeri 1 Martapura.

#### 5. Bab V: Kesimpulan dan Saran

Merupakan bagian terakhir dari penulisan tesis ini yang membahas tentang kesimpulan dan saran-saran sesuai dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini.